

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bahwa upaya kesehatan hanya dapat diwujudkan dalam suatu wadah atau tempat pelayanan kesehatan. Suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif disebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi 3 tingkatan tercantum dalam Permenkes RI no. 6 pasal 1 tahun 2013, yaitu: (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, mencakup Puskesmas, Poliklinik, Dokter Praktek dan sebagainya, (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesialisik, (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan spesialisik, dan pelayanan kesehatan sub spesialisik (Kemenkes RI, 2013).

Puskesmas termasuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan yang bermutu pasti menggunakan pendekatan manajemen sehingga pengelolaannya menjadi efektif, efisien, dan produktif. Maka dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, akan berhasil bila organisasi tersebut mampu melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Tanpa adanya suatu perencanaan yang baik,

kemungkinan organisasi tersebut akan mengalami kegagalan. Paling tidak dalam pencapaian tujuan kemungkinan akan timbul suatu hal yang tidak diharapkan. Ini disebabkan karena perencanaan pada hakikatnya menetapkan apa yang dilakukan, bagaimana, serta siapa yang melakukan, sebelum pekerjaan itu sendiri dilakukan (Hilma, 2011 dalam Ramsar, Darmawansyah, Nurhayani, 2012).

Menurut Notoatmodjo (2003, dalam Herlambang, Murwani, 2012) manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan masyarakat melalui program kesehatan.

Dalam pencapaian program dan tujuan – tujuan pada suatu organisasi supaya efektif dan efisien dapat diberlakukan empat fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Terry dengan penambahan fungsi evaluating (Penilaian), sehingga fungsi-fungsi manajemen Puskesmas antara lain: Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Penggerakan/Pelaksanaan), Controlling (Pengawasan/Pembimbingan), Evaluating (Penilaian) (Sulaeman, 2009).

Arah kebijakan peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dalam rpjmn 2015 – 2019 salah satunya menjelaskan bahwa pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta (Kemenkes RI, 2015). Dalam artian untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka pemerintah mewajibkan puskesmas untuk melakukan akreditasi.

Pemerintah dalam RPJMN 2015 – 2019 indikator meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dengan jumlah data awal 0 pada tahun 2014 menargetkan tahun 2019 jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi sebanyak 5.600 (Kemenkes RI, 2015).

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan tercantum dalam Permenkes RI no. 75 tahun 2014 (Kemenkes RI, 2014).

Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi saja, tercantum dalam Permenkes RI no. 46 tahun 2015 (Kemenkes RI, 2015).

Dalam penerapan sistem akreditasi harus ada perencanaan yang sesuai dengan standar akreditasi. Mulai dari perencanaan puskesmas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan yang bersifat komprehensif serta perencanaan program puskesmas. Perencanaan tersebut tercantum dalam standar akreditasi puskesmas. Dalam standar akreditasi puskesmas terdapat 9 bab dan 802 elemen penilaian dengan cara penilaiannya yaitu memberi skor

pada setiap elemen penilaian. Pemberian skor pada setiap elemen penilaian tersebut dengan melakukan metode telusur serta mengidentifikasi dokumen terkait 9 bab (Kemenkes RI, 2015).

Dokumen Akreditasi puskesmas merupakan bukti tertulis atau bukti yang berupa rekaman suara maupun gambar yang dapat dijadikan bukti keterangan akreditasi puskesmas. Dokumen tersebut dijadikan pembuktian untuk penilaian akreditasi. Sedangkan dokumen kepemimpinan dan manajemen puskesmas dalam bidang perencanaan adalah bukti tertulis atau bukti yang berupa rekaman suara maupun gambar tentang kepemimpinan dan manajemen puskesmas dalam bidang perencanaan untuk penilaian akreditasi.

Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang menjadi pilihan dari pemerintah untuk uji coba implementasi akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama serta kabupaten yang sebagian besar puskesmas sedang merencanakan dan mempersiapkan pengembangan mutu pelayanan kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah atau yang disebut dengan akreditasi. 19 puskesmas dari 25 puskesmas Wilayah Bondowoso telah mempersiapkan dokumen terkait 9 bab standar akreditasi yang menjadi syarat sertifikasi akreditasi salah satu babnya tentang kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Puskesmas Maesan merupakan salah satu puskesmas yang masih dalam proses akreditasi. Puskesmas tersebut sebelumnya telah mengajukan untuk penilaian akreditasi tetapi masih ada yang kurang sesuai atau belum terpenuhi dokumen maupun pelaksanaannya sehingga puskesmas tersebut belum mendapat predikat akreditasi paripurna atau belum dinyatakan lulus akreditasi. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk mengetahui bagaimana

kesesuaian serta penilaian kelengkapan dokumen akreditasi tentang kepemimpinan dan manajemen puskesmas dalam bidang perencanaannya saja. Dengan demikian peneliti semakin terpacu untuk melaksanakan penelitian tersebut dengan mengangkat tema “Monitoring Dokumen Kepemimpinan Dan Manajemen Puskesmas Dalam Bidang Perencanaan Berdasarkan Standar Akreditasi Di Puskesmas Maesan Kabupaten Bondowoso”.

B. Rumusan Masalah

1. Pernyataan Masalah

Dalam penerapan sistem akreditasi harus ada perencanaan yang sesuai dengan standar akreditasi, yang berarti dalam setiap perencanaan pengembangan mutu pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar akreditasi. Didalam 9 bab standar akreditasi tersebut tercantum beberapa perencanaan puskesmas. Salah satunya bab tentang kepemimpinan dan manajemen puskesmas, perencanaan mulai dari tata kelola sarana puskesmas hingga pemeliharaan sarana dan prasarana. Perencanaan di dalam bab kepemimpinan dan manajemen puskesmas telah sesuai atau belum dengan standar akreditasi yang telah ditetapkan. Perencanaan pada bab tersebut dikatakan telah sesuai atau belum dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen terkait elemen perencanaan tersebut di puskesmas yang akan diteliti. Ada pula penilaian akreditasi untuk dokumen pembuktian dari puskesmas tersebut.

2. Pertanyaan Masalah

- a. Bagaimana kelengkapan dan kesesuaian dokumen kepemimpinan dan manajemen puskesmas Di Puskesmas Maesan Kabupaten Bondowoso dalam bidang perencanaan berdasarkan standar akreditasi?
- b. Berapa persentase nilai kelengkapan dan kesesuaian dokumen kepemimpinan dan manajemen puskesmas dalam bidang perencanaan berdasarkan standar akreditasi Di Puskesmas Maesan Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui dan menilai kelengkapan serta kesesuaian dokumen kepemimpinan dan manajemen puskesmas dalam bidang perencanaan berdasarkan standar akreditasi Di Puskesmas Maesan Kabupaten Bondowoso.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi dokumen bidang perencanaan dalam standar persyaratan puskesmas sebagai fasyankes tingkat pertama
- b. Mengidentifikasi dokumen bidang perencanaan dalam standar persyaratan ketenagaan puskesmas
- c. Mengidentifikasi dokumen bidang perencanaan dalam standar kegiatan pengelolaan puskesmas
- d. Mengidentifikasi dokumen bidang perencanaan dalam standar hak dan kewajiban pengguna puskesmas

- e. Mengidentifikasi dokumen bidang perencanaan dalam standar kontrak pihak ketiga
- f. Mengidentifikasi dokumen bidang perencanaan dalam standar pemeliharaan sarana dan prasarana

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Kesehatan

Sebagai landasan untuk pengembangan puskesmas dan penerapan akreditasi puskesmas di Indonesia.

2. Bagi Puskesmas

Sebagai landasan untuk menerapkan standar akreditasi yang telah berlaku.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian mampu memberikan pengetahuan tentang dokumen akreditasi tentang kepemimpinan dan manajemen puskesmas terkait perencanaan akreditasi yang terdapat pada standar akreditasi puskesmas, dan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memperluas semua sub dari manajemen.